

**SISI KRITIS *BOTTOM UP PLANNING*
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
Studi Kasus: Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Di
Kabupaten Buleleng**

Nguh Arya Kusuma¹, Luh Putu Mahyuni²

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui permasalahan dan kendala dari perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng dan mengetahui hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disusun dengan narasi dan tabel hasil wawancara dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program PKRS. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah perencanaan partisipatif program PKRS telah terlaksana di Kabupaten Buleleng. Namun masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahannya adalah kurangnya tingkat kehadiran, penerima bantuan belum mampu berpendapat dan kurang paham dengan program, belum optimalnya fungsi KPB, kenaikan harga bahan bangunan, memerlukan waktu lama serta keswadayaan rendah. Sedangkan kendalanya adalah anggapan sosialisasi hanya formalitas, kurangnya minat berdiskusi dan terlibat sebagai pengurus KPB, penerima bantuan tidak memahami teknis bangunan serta harga yang tergantung distributor. Selanjutnya yaitu kendala penentuan hari baik, musim hujan serta pemenuhan administrasi. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pelaksanaan PKRS yaitu menambahkan media dan melibatkan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi. Verifikasi CPB dilakukan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan penilaian jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan. Selain itu peran kelompok, pelatihan konstruksi bangunan kepada tukang serta pendampingan ke penerima bantuan dan mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi administrasi.

Kata kunci: Perencanaan Partisipatif, Rumah layak huni, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Abstract

The purpose of this study is to find out the problems and constraints of participatory development planning in the PKRS program in Buleleng Regency and to find out things that need to be improved in participatory development planning in the PKRS program in Buleleng Regency. The research design used was a qualitative method, which was compiled with narratives and tables of interview results from informants who had a direct relationship with the implementation of the PKRS program. The result of this research is that the participatory planning of the PKRS program has been implemented in Buleleng Regency. However, there are still problems and obstacles in its implementation. The problems are the lack of attendance, beneficiaries have not been able to express their opinion and do not

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional

understand the program, the function of the KPB is not yet optimal, the price of building materials increases, it takes a long time and low self-reliance. Meanwhile, the obstacles are the assumption that the socialization is only a formality, the lack of interest in discussing and being involved as a KPB administrator, the recipients of assistance do not understand the technicalities of the building and the price depends on the distributor. The other significant obstacle are determining good days, rainy days, and administrative compliance. Therefore, some efforts are needed to improve the implementation of PKRS, namely adding media and involving relevant agencies in outreach activities. CPB verification is carried out by involving village/kelurahan officials, followed by an assessment of the type of damage and measurement of material requirements. In addition to the role of groups, building construction training for builders and assistance to beneficiaries and inviting aid recipients to participate in doing administrative documentation.

Keywords: *Bottom-Up Planning, Liveable Home, Improving The Quality of House by Self*

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat atau partisipasi *bottom up* menurut Tawai dan Adrian (2017: 20-21) untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan gagasan sesuai dengan kemampuannya selama proses berlangsung. Dengan perencanaan yang partisipatif dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya, keinginan serta harapan masyarakat dan segala potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Selanjutnya keterlibatan ini masyarakat akan mampu untuk melaksanakan, memanfaatkan ataupun memelihara hasil pembangunan karena adanya rasa ikut memiliki.

Partisipasi masyarakat seperti disampaikan Sutarta (2002 : 23) merupakan hal yang utama karena merekalah yang paling mengetahui dan mengerti dari permasalahan yang sedang mereka hadapi dari lingkungan sosial ekonominya. Dalam hal ini masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana kondisi serta permasalahan dan kendala yang terjadi di dalam lingkungan mereka, sehingga dapat dirumuskan penyelesaian yang tepat guna dan sasaran. Selain itu juga hasil produksi dan kreatifitas dalam pembangunan juga akan mengalami peningkatan karena partisipasi akan lebih mengutamakan penggunaan sumber daya setempat untuk dimanfaatkan.

Salah satu program pemerintah yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat adalah Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang disingkat PKRS. Program PKRS adalah bantuan untuk peningkatan kualitas rumah dengan merangsang keswadayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat menempati rumah

yang layak huni. Rumah yang layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan akan keselamatan dan kekuatan bangunan, memiliki, memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya serta memiliki kecukupan luas minimum bangunan.

Proses pelaksanaan PKRS dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, yang dimulai dari proses penyiapan masyarakat sampai dengan proses pembangunan secara fisik yang mencakup: a) Sosialisasi dan penyuluhan, b) Verifikasi CPB (Calon Penerima bantuan), c) Kesepakatan dan Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), d) Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah, e) Survey toko, f) Penyusunan Proposal, g) Pemanfaatan bantuan Program PKRS dan h) Pelaporan PKRS.

Sudah tentu di dalam perjalanan pada tahapan program PKRS ini mengalami berbagai tantangan dan permasalahan karena masyarakat yang masih awam dan kondisi tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Masih banyak penerima bantuan belum mengetahui spesifikasi bahan bangunan yang baik dan berstandar yang dapat aplikasikan dalam membangun rumah sehingga terwujud rumah yang memenuhi keselamatan dan kekuatan bangunan.

Selain itu penerima bantuan belum dapat menentukan kebutuhan bahan untuk memperbaiki kerusakan dari rumah mereka. Seringkali volume bahan yang dipilih melebihi kebutuhan dari pembangunan rumah sehingga menjadi tidak terpakai secara optimal. Dalam upaya pemilihan toko penyedia bahan bangunan pun terlalu terkendala jumlah toko penyedia bahan yang diinginkan berbeda-beda antar penerima bantuan yang mengakibatkan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) menjadi terlambat karena belum terdapat harga yang disepakati. Kurang siapnya dana swadaya dari penerima bantuan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan rumah. Swadaya masyarakat merupakan pendukung dalam menyelesaikan pembangunan rumah. Swadaya merupakan salah satu syarat dalam menerima bantuan PKRS karena jumlah bantuan dari pemerintah tentu tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan pembangunan rumah.

Pendekatan perencanaan partisipatif juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui proses perencanaan partisipatif di tempat yang berbeda, studi kasus yang berbeda dan mengetahui hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut guna mendapatkan referensi lainnya. Rujukan penelitan sebelumnya yang digunakan oleh peneliti

adalah: Abady (2013) menuliskan dalam penelitiannya yang berjudul *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah* Perencanaan Partisipatif menyimpulkan bahwa dalam upaya pelaksanaan perencanaan yang optimal hanya dapat terselenggara jika sistem perencanaan yang ada sudah mendukung. Keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang tingkat desa sudah berada pada level yang baik akan tetapi pada pelaksanaan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat kecamatan maupun kabupaten tingkat keterlibatan masyarakat justru semakin rendah. Besarnya faktor penentu oleh pemerintah, komunikasi yang belum dua arah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih kurang menjadi faktor yang menentukan dalam tingkat keterlibatan dalam pelaksanaan musrenbang.

Dalam penelitian yang mengambil studi kasus pembangunan perluasan pasar tradisional di Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dengan judul *Partisipasi masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif* dijelaskan oleh Laily (2015) bahwa masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan pembangunan partisipatif sehingga musrenbangdes belum berfungsi sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dan hanya merupakan formalitas. Terdapat dua faktor yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif pada pembangunan perluasan pasar tradisional di Desa Sugio yaitu berasal dari dalam (internal) masyarakat itu sendiri maupun dari luar atau lingkungan sekitarnya (eksternal). Faktor yang berasal dari dalam yaitu tingkat pendidikan dan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar adalah dominannya kepemimpinan dari aparat pemerintah desa dalam mengarahkan dan membina masyarakatnya.

Rahman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* menyimpulkan bahwa tingkat pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat sangat mempengaruhi hasil yang dicapai dalam program pembangunan. Adapun hasil penelitian terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat masih enggan untuk turut serta mengikuti proses yang berlangsung dan kurangnya kemampuan masyarakat untuk ikut rebug dalam merencanakan pembangunan. Di samping itu tim perwakilan desa/kelurahan belum memiliki kemampuan bernegosiasi dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan ataupun kabupaten. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa antara masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses perencanaan pembangunan.

Akbar, dkk. (2018) dalam penelitiannya yang mengambil lokasi di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo menyimpulkan bahwa faktor kuatnya kepemimpinan dalam membina dan memberdayakan masyarakatnya sangat berpengaruh dalam tingkat partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut memberikan masukan atau aspirasi kegiatan dalam pembangunan desa yang direncanakan sebelum ditetapkan sebagai program pembangunan prioritas. Selanjutnya adalah faktor komunikasi yaitu melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan dimana rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Jatimulya berpengaruh sangat besar pada perencanaan pembangunan.

Sulam (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembangunan Partisipatif Dalam Dinamika Pembangunan yang mengambil lokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran menyimpulkan bahwa pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Desa Mekarsari. Namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang kurang intensif antara masyarakat dan pemerintah mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pada pelaksanaan pembangunan. Selain itu sarana yang tidak tersedia dengan baik dan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak aktif ikut mempengaruhi tingkat partisipasi.

Hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan partisipatif belum mendapat perhatian dari masyarakat. Kurangnya pelibatan dan keikutsertaan masyarakat disebabkan karena tidak terjalin komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan kemampuan yang belum memadai dari aparat maupun masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif. Selain itu team perwakilan desa dan kelurahan belum memiliki kemampuan dalam melakukan negosiasi dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selanjutnya adalah faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam tingkat partisipasi dalam merencanakan pembangunan karena mereka belum memahami tujuan dan manfaat dari proses dan perencanaan pembangunan di desanya.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian terdahulu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan partisipatif program PKRS. Penelitian dilakukan terhadap program tersebut terkait proses yang terjadi dalam perencanaan pembangunan partisipatif program PKRS sehingga dapat mengetahui berbagai

kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan serta dapat mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan partisipatif program PKRS dan sisi kritis yang menentukan tercapainya tujuan perencanaan pembangunan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Buleleng dengan mengambil tempat di kota dan desa yang telah melaksanakan program PKRS di tahun sebelumnya. Untuk lokasi di kota yaitu di Kelurahan di Kelurahan Penarukan dan untuk lokasi desa dipilih Desa Anturan karena selain melaksanakan PKRS di tahun sebelumnya. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:14) merupakan suatu metode yang menggunakan dalam meneliti populasi / sampel tertentu, dengan kondisi alami, bersifat *postpositivisme*, peneliti merupakan instrumen dari penelitian yang dilaksanakan dengan cara *purposive*. Informan yang menjadi sumber informasi adalah orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PKRS, yaitu unsur penerima bantuan, unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, unsur tenaga pendamping serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkimta Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk meminta pendapat langsung kepada para pelaku Program PKRS dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif kegiatan ini secara mendalam. Sedangkan dokumentasi sebagai pendukung untuk melengkapi hasil wawancara dengan mengambil data yang diperlukan dalam penyampaian hasil penelitian ini seperti dokumen perencanaan, daftar hadir kegiatan perencanaan, proposal usulan bantuan dan laporan hasil pelaksanaan. Dalam penelitian, analisis data merupakan suatu analisa kritis sebagai suatu cara berpikir untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan PKRS melalui pengumpulan data terhadap kegiatan, melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman (2007:173) dengan 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu 1) Reduksi data, sebagai proses pemilihan data yang pokok dan penting, sesuai dengan tema dan pola serta membuang data yang tidak diperlukan. 2) Penyajian data, merupakan rangkaian dari informasi yang telah disusun sistematis sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Adapun dalam penelitian ini penyajian data melalui teks yang naratif, dan tabel, serta 3) Penarikan kesimpulan, data yang konsisten dan valid akan mendukung penarikan kesimpulan. Dalam

penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan adanya temuan baru berupa gambaran atau deskripsi dari obyek penelitian yang awalnya belum jelas menjadi jelas dengan dilakukannya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Program PKRS, progres pekerjaan sudah terlaksana dengan baik dan pembangunan sudah dapat diselesaikan oleh penerima bantuan. Seperti disampaikan oleh Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka yaitu :

“Pelaksanaan PKRS di Desa Anturan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran dengan membidik masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.”

Adapun menurut Ndraha (1990:103) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah : a) Partisipasi menerima dan memberikan informasi, b) Partisipasi dalam pemberian tanggung jawab dan saran terhadap informasi yang telah diterima, c) Partisipasi dalam merencanakan pembangunan, d) Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan e) Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan, yang telah dilakukan di dalam tahapan program PKRS adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1. Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan PKRS

No	Bentuk Partisipasi (Ndraha, 1990:103)	Tahapan PKRS	Hal yang dilakukan
1	Partisipasi menerima dan memberikan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan Sosialisasi 	Menghadiri kegiatan sosialisasi PKRS yang dilaksanakan
2	Partisipasi dalam pemberian tanggung jawab dan saran terhadap informasi yang telah diterima	<ul style="list-style-type: none"> • Tahapan Verifikasi CPB 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti proses verifikasi dan memberikan informasi yang benar terkait administrasi dan teknis calon penerima
		<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan dan Pembentukan KPB 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersepakat bersama dalam membentuk kelompok • Menunjuk tukang

3	Partisipasi dalam merencanakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi kerusakan rumah dan kebutuhan bahan bangunan bersama tukang atau pendamping
		<ul style="list-style-type: none"> • Survey Toko 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey toko guna menunjuk penyedia bahan bangunan
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proposal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proposal permohonan beserta rencana anggaran biaya PKRS
4	Partisipasi dalam melaksanakan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan PKRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan rumah sampai selesai • Berswadaya dalam pelaksanaan kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan PKRS 	Membuat laporan pertanggungjawaban
5	Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan	Rumah yang layak huni	Menempati rumah yang merupakan <i>outcome</i> dari program PKRS.

Sumber: analisa peneliti, 2022

Dalam tahapan pelaksanaan program PKRS terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu :

1. Sosialisasi

Cahyono (2019:68-70) menyatakan bahwa meningkatkan peran partisipasi masyarakat harus diawali dengan kegiatan sosialisasi sebelum program atau suatu kegiatan dilaksanakan. Kehadiran dalam tahapan sosialisasi akan mendukung keberhasilan dari program karena dalam sosialisasi akan disampaikan mengenai tata cara pelaksanaan dari program. Dengan kehadiran dari masyarakat maka mereka akan mendapatkan pemahaman secara intensif serta informasi yang berkaitan dengan program akan tersampaikan secara detail dan masyarakat dapat langsung menyampaikan pendapat maupun pertanyaan apabila terdapat hal yang belum dipahami pada saat kegiatan sosialisasi. Selain itu juga kegiatan sosialisasi sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi tahapan pembangunan. Namun tingkat

kehadiran masih belum optimal karena kesibukan dari peserta maupun merasa kegiatan sosialisasi ini hanya merupakan formalitas sehingga sering diwakilkan oleh kerabatnya, seperti yang disampaikan Bapak Arry selaku tenaga pendamping yaitu :

“Karena notabene masyarakat yang kita proyeksikan sebagai calon penerima ini terkadang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jadi secara perspektif mereka punya pemikiran terkadang ah kita itu disuruh datang-datang saja belum tentu kita mendapat bantuan.”

Begitupula dalam tahapan sosialisasi belum adanya komunikasi dua arah dari peserta terkait hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi maupun jika terdapat hal-hal yang belum dipahami seperti disampaikan Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka yaitu :

“Kurang minatnya masyarakat dalam berdiskusi ataupun bertanya pada sesi diskusi serta kurang mengetahui informasi tentang pengetahuan membangun rumah dan spek teknis lainnya.”

2. Verifikasi CPB

Seperti disampaikan Nurcholis (2009:12-13) yang menyatakan bahwa dalam salah satu nilai tambah dalam perencanaan partisipatif yaitu meningkatkan ketepatan sasaran, dengan telah teridentifikasi target dan sasaran melalui pendekatan partisipatif maka keputusan yang diambil akan tepat guna. Pada tahapan verifikasi CPB ini guna memverifikasi kondisi rumah dan persyaratan kelengkapan administrasi memerlukan waktu yang lama seperti disampaikan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :

“ya karena memang kita langsung door to door ini mendatangi rumah calon penerima, melihat langsung kondisi real nya disana memang kita kalau segi waktu kita sangat ditentukan dengan lokasi masing-masing penerima bantuan.”

Verifikasi CPB dilakukan oleh Dinas Perkimta bersama tim pendamping bertujuan untuk menentukan penerima bantuan yang memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis sehingga akan menghasilkan hasil yang optimal dan menghindarkan dari permasalahan lainnya. Selain administrasi yang telah memenuhi syarat, secara teknis bangunan tersebut juga dinyatakan layak menerima bantuan dengan kriteria tidak memenuhi keselamatan bangunan, kesehatan bangunan serta kecukupan ruang.

Dalam tahapan ini diperlukan waktu yang agak panjang karena letak dari rumah-rumah penerima bantuan yang berjauhan. Verifikasi dilakukan dengan mengunjungi rumah-

rumah penerima bantuan untuk melihat kondisi kerusakan bangunan secara langsung. Sehingga dapat melakukan penilaian dan kelayakan terhadap rumah tersebut untuk menerima atau tidak layak menerima. Selain itu verifikasi secara administrasi juga dilakukan yaitu kesesuaian alamat pada KTP dengan lokasi bangunan serta legalitas dalam kepemilikan lahan (milik sendiri/warisan/penguasaan lahan dengan surat yang sah).

Untuk masyarakat yang dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKRS tentu akan merasa tidak puas karena merasa memiliki kesamaan dengan masyarakat yang dinyatakan layak. Hal ini diakibatkan karena mereka tidak memiliki legalitas lahan serta kondisi rumah yang masih layak. Kekurangpahaman dalam menerima informasi pada saat sosialisasi ataupun tidak mengikuti dengan seksama merupakan penyebab dari hal tersebut.

Begitupula terdapat calon penerima bantuan yang masih belum memahami akan kriteria dari penerima bantuan sehingga mempertanyakan kembali pada saat dinyatakan tidak layak menerima seperti disampaikan oleh kadek Arry yaitu :

“Terkadang masyarakat niki salah tafsir pak, dikira bantuan niki datang, ujug-ujug datang atau datang ke masyarakat bisa langsung di realisasikan.”

3. Kesepakatan dan Pembentukan KPB

Melalui pemberdayaan dari kelompok penerima bantuan menurut Hamid (2018:83) sebagai wujud partisipasi dari penerima bantuan sehingga akan memahami akan tugas dan kewajibannya untuk meningkatkan serta mengembangkan produktivitasnya. Tujuan dari pembentukan kelompok juga untuk menumbuhkan semangat bergotong-royong antar anggota penerima bantuan di dalam pelaksanaan perbaikan rumah.

Namun tujuan dari pembentukan kelompok belum sepenuhnya dapat terwujud sesuai pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan di Kelurahan Penarukan, Bapak Dewa Ketut Budiasa yaitu :

“Itu (fungsi kelompok dan gotong royong) sebenarnya beberapa saja yang terwujud terutama yang tidak mempunyai hp. Itu masalahnya kendala disana..”

Serta sesuai dengan dari Perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka adalah kurangnya minat dari penerima bantuan untuk ikut berpartisipasi sebagai pengurus di kelompok yaitu :

“Kurang minatnya penerima bantuan sebagai pengurus organisasi kelompok.”

4. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah

Demikian juga seperti yang disampaikan oleh Hamid (2018:83) bahwa tujuan dari perencanaan partisipatif salah satunya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan identifikasi terhadap kebutuhannya. Namun di dalam pelaksanaannya sesuai dengan pernyataan Bapak Arry selaku pendamping masih terdapat penerima bantuan yang kurang paham terkait kerusakan bangunan yaitu :

“Karena satu kekurangpahaman ini bisa saya bilang hampir mayoritas di dampingan tiang pak, itu kemampuan atau pemahaman masyarakat itu masih sangat awam sekali, terkait dengan konstruksi bangunan.”

Serta pengetahuan mengenai teknis perhitungan kebutuhan akan keperluan bahan bangunan yang belum dipahami seperti disampaikan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu:

“Jadi masyarakat umum itu melihat rumahnya, wah atap saya bocor, ganti atap. Itu kan tidak bisa langsung ganti atap. Harus ada perhitungan-perhitungan, mungkin kita lihat kuda-kudanya, struktur bangunannya, itu yang akan kita tuangkan dalam RAB.”

5. Survey Toko

Nilai tambah dalam perencanaan pembangunan partisipatif menurut Nurcholis (2009:12-13) antara lain efisiensi, efektif. Dalam efisiensi tahapan survey toko dilakukan untuk memilih toko yang akan ditunjuk sebagai penyedia bahan bangunan. Survey toko dilakukan di lokasi yang dekat dengan penerima bantuan yang mengutamakan sumber daya dan kemampuan setempat dalam pelaksanaan program PKRS.

Bahwa dalam pelaksanaan survey harga bahan bangunan seringkali memerlukan waktu yang lama karena keperluan kebutuhan bahan bangunan yang berbeda antar penerima bantuan memerlukan waktu untuk merekapitulasi kebutuhan bahan. Selain ini adanya perubahan harga bahan bangunan yang dinamis di pasaran sesuai dengan pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :

“Untuk harga survey toko, yang kadang-kadang bikin lama itu kan membuat list kebutuhan bahan itu yang biasanya membuat lama. Jadi kebutuhan bahan apa saja karena masing-masing penerima bantuan kan berbeda-beda kebutuhan bahannya.”
“Memang sekarang ini ada dinamisnya perubahan harga. Apabila dari pihak toko mampu menunjukkan seandainya ada kenaikan harga pihak toko bisa menunjukkan bahwa memang dari supplier itu menaikkan harga itu tentu terjadi perubahan harga ini..”

6. Menyusun Proposal

Menurut Pasaribu (1982:17) partisipasi merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan gagasan dan sumbangan. Dengan partisipasi sebagai bentuk hubungan mitra kerja antara masyarakat dan pemerintah, maka masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam merumuskan keputusan, ikut dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta ikut dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan.

Penerima bantuan tersebut masih memerlukan pendampingan dalam penyusunan proposal karena mereka masih awam dan baru pertama kali dalam melakukan perencanaan secara partisipatif, seperti dijelaskan oleh tenaga pendamping Bapak Arry yaitu :

“kendalanya seperti tadi disampaikan bahwasanya warga tiang (saya), yang tiang dampingi khususnya, karena kebanyakan lansia, sudah barang tentu dari segi pengetahuan untuk membuat RAB itu pasti sangat awam sekali pak. Jadi memang seperti yang tadi tiang sampaikan, tiang berkolaborasi dengan tukang dan juga dengan pendamping kita melakukan koordinasi intens.”

Begitu juga dengan satuan dari bahan bangunan tersebut, penerima bantuan tidak mengetahui satuan baku yang digunakan dalam membuat RAB sesuai pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :

“jumlah bahan bangunan yang ada pun juga ada bakunya. Mungkin kalau di masyarakat mengenal saya biasa beli pasir 1 kol, seperti ukuran-ukuran yang tidak pasti itu kita harus sampaikan bahwa mungkin kalau 1 kol itu isinya kita pakai kalau pasir tetap pakai kubikasi 1 kol sebanyak 2 kubik (mungkin) atau 1 kubik biar dia memahami sehingga yang dituangkan di RAB itu memang jumlah maupun harga yang memang benar-benar hasil survey.”

7. Pemanfaatan PKRS

Menurut Hamid (2018:83), untuk menyelesaikan perbaikan rumah sangat dibutuhkan adanya komitmen dari penerima bantuan. Komitmen yang tercipta merupakan tujuan dari perencanaan pembangunan partisipatif sehingga rumah yang layak huni dapat terwujud sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pemanfaatan PKRS yang dilaksanakan melalui perbaikan rumah tidak layak huni terkendala dari penentuan hari baik atau dewasa ayu untuk memulai suatu pekerjaan pembangunan rumah seperti disampaikan oleh tenaga pendamping Bapak Arry yaitu :

“kalau kendalanya kebanyakan masyarakat apalagi kalau ada di Bali, sangat tergantung dengan adanya dewasa ini kendalanya kalau kita di Bali pak. Dewasa

ini sangat kendala. Ya ini dulu yang menjadi penentu utama masyarakat untuk melakukan progres pekerjaan fisik pak.”

Selain hal di atas keswadayaan yang merupakan hal yang wajib dalam program PKRS masih menjadi permasalahan karena penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan pernyataan dari perbekel Anturan Bapak I Ketut Soka yaitu :

“Pada pelaksanaan fisik di lapangan terjadi keterlambatan karena faktor cuaca di musim penghujan, faktor lansir bahan, menentukan hari baik dalam membangun rumah (dewasa) serta swadaya yang kurang mencukupi.”

8. Pelaporan PKRS

Pertanggungjawaban seperti dijelaskan Hamid (2018:83) merupakan tujuan dari perencanaan partisipatif karena pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan tentu harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Adanya pelaporan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program yang dilaksanakan secara mandiri oleh penerima bantuan.

Untuk memenuhi pelaporan PRKS masih memerlukan waktu yang lama karena dokumen-dokumen pendukung tidak segera dapat dikumpulkan, sesuai dengan penjelasan dari Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :

“Tapi memang dari segi waktu lah banyak-banyak yang molor tapi astungkara semua melakukan pelaporan.”

“Disini ketika proses pembangunan telah selesai, kita lanjutkan dengan proses pelaporan karena memang beberapa laporan kendala nya sih begini kadang-kadang nota-nota pembelian itu mereka lupa naruhnya dimana.”

Rangkuman permasalahan dan kendala pada pelaksanaan program PKRS dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 2. Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PKRS

No	Tahapan	Masalah	Kendala
1	Sosialisasi	1) Kurangnya tingkat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi 2) Penerima bantuan tidak dapat	1) Penerima bantuan merasa kegiatan sosialisasi hanya berupa formalitas 2) Kurangnya minat masyarakat

No	Tahapan	Masalah	Kendala
		menerima informasi dengan baik	untuk berdiskusi ataupun bertanya dalam kegiatan sosialisasi
2	Verifikasi CPB	1) Memerlukan waktu lama untuk melakukan verifikasi di lokasi. 2) Terdapat CPB yang tidak menerima ketika dinyatakan tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan.	1) Lokasi CPB yang berjauhan 2) CPB belum memahami persyaratan secara utuh
3	Kesepakatan dan Pembentukan KPB	1) Kelompok belum berfungsi secara optimal dalam kegiatan PKRS	1) Terdapat anggota kelompok yang tidak memiliki telepon sebagai sarana informasi sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi dengan anggotanya 2) Kurangnya minat penerima bantuan sebagai pengurus dalam KPB.
4	Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah	1) Penerima bantuan tidak dapat menentukan kebutuhan penanganan rumah yaitu volume dan luas dari jenis kerusakan dan kebutuhan dari bahan bangunan.	1) Penerima bantuan tidak memahami teknis penilaian bangunan.
5	Survey Toko	1) Harga bahan bangunan yang cenderung naik 2) Memerlukan waktu yang lama dalam survey	1) Karena harga bahan bangunan yang dijual tergantung harga distributor 2) Penerima bantuan mempunyai kebutuhan bahan bangunan yang berbeda.

No	Tahapan	Masalah	Kendala
6	Menyusun proposal	1) Penerima bantuan belum memahami kebutuhan bahan dan satuan bahan bangunan yang digunakan dalam menyusun RAB.	1) Penerima bantuan selalu berganti setiap tahun sehingga perlu memberikan pemahaman dan pembelajaran lagi.
7	Pemanfaatan PKRS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perbaikan rumah tidak bisa segera dilakukan setelah bantuan tersalurkan. • Terdapat penerima bantuan yang memiliki keswadayaan rendah. 	1) Penentuan hari baik untuk memulai suatu pekerjaan pembangunan runah serta cuaca pada musim hujan 2) penerima bantuan yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah
8	Pelaporan PKRS	1) Pembuatan laporan memerlukan waktu lama	1) Kelengkapan administrasi yang tidak tersimpan dengan baik

Sumber: analisa peneliti, 2022

Untuk meningkatkan pelaksanaan program PKRS diperlukan adanya upaya-upaya dalam perencanaan partisipatif sehingga berkelanjutan, menurut Nurcholis (2009:12-13) bahwa masyarakat yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses, akan meningkatkan rasa kepedulian terhadap hasil pembangunan sehingga mereka akan turut menjaga dan memeliharanya.

Pada program PKRS ini penerima bantuan telah mengikuti rangkaian proses pada tahapan kegiatan yang dilaksanakan sehingga memberikan suatu pembelajaran dan interaksi antar sesama penerima dalam merumuskan suatu keputusan, seperti dalam pernyataan dari Kabid. Kawasan Permukiman yaitu :

“Saling mengisi. Inilah sebenarnya roh swadaya. Kenapa mungkin pemerintah pusat menggelontorkan dana dengan skema swadaya, ada stimulan kepada masyarakat, ada edukasi kepada masyarakat,kita pun sebagai pemerintah paling bawah memahami kondisi masyarakatnya.”

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program PKRS diperlukan adanya suatu analisa kritis yang merupakan suatu cara berpikir untuk melakukan evaluasi terhadap

kegiatan PKRS melalui pengumpulan data terhadap kegiatan, melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Menurut Cahyono (2019:68-70) bahwa untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi hal-hal yang dapat menghambat serta hal-hal yang dapat mendorong meningkatnya proses partisipasi. Adapun hal yang perlu ditingkatkan dalam setiap tahapan berdasarkan hasil dari penelitian adalah :

Tabel 3. Hal yang perlu ditingkatkan dan sisi kritis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKRS

No	Tahapan	Hal yang perlu ditingkatkan	Sisi kritis yang menjadi perhatian
1	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan sarana berupa buku panduan atau brosur dan materi yang memuat tentang pelaksanaan PKRS untuk mendukung sosialisasi. • Turut mengundang instansi terkait seperti Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum untuk menambahkan penekanan tentang tanggung jawab dalam penyelesaian program secara baik dan benar. <p>Seperti disampaikan oleh Bapak Arry selaku pendamping yaitu : <i>“Sekiranya kita buat buku panduan untuk masyarakat. Walaupun ya sekiranya satu lembar kertas. Disana kita buat kesimpulan-kesimpulan dan inti-intinya saja terkait apa yang harus dijadikan petunjuk pasti dan juga, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.”</i></p> <p>Begitu juga dengan pernyataan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“...dan yang penting begini pada saat sosialisasi kami mengundang dari tim APH (Aparat penegak Hukum.”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penerima bantuan merupakan individu yang berganti setiap tahun sehingga perlu adanya pemberian informasi yang intensif di setiap tahapan ➢ Diperlukan pendampingan dan monitoring secara rutin dari pihak terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan program ➢ Mengoptimalkan peran kelompok dalam tahapan PKRS sehingga penyelesaian permasalahan maupun pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan baik dan benar. ➢ Peningkatan kualitas dari tukang sebagai pendukung penerima bantuan dalam pelaksanaan PKRS melalui pelatihan tukang sebelum pelaksanaan program. ➢ Kearifan lokal atau budaya setempat sebagai salah satu pertimbangan dalam

No	Tahapan	Hal yang perlu ditingkatkan	Sisi kritis yang menjadi perhatian
2	Verifikasi CPB	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam verifikasi CPB dilanjutkan dengan penilaian jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan • Turut mengajak aparat desa/kelurahan dalam kegiatan verifikasi. <p>Seperti disampaikan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“.....seperti tadi kami sampaikan ketika kita melakukan verifikasi, ketika calon penerima itu memang sudah layak, kita langsung melihat atau menghitung secara garis besar kerusakan rumahnya..”</i> Serta, <i>“.....Jadi pada saat verifikasi selain mengajak apa istilahnya aparat desa, kepala lingkungan atau kelian dusun....”</i></p>	pelaksanaan program PKRS ➤ Melibatkan penerima bantuan dalam upaya memenuhi dokumen administrasi pelaksanaan
3	Kesepakatan dan Pembentukan KPB	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaktifkan peran kelompok dalam program PKRS melalui rembuk warga guna meningkatkan semangat gotong-royong. <p>Seperti disampaikan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“Sekaligus ketua kelompok ini memantau anggota kelompoknya yang melakukan pembangunan. Apakah ini semua sudah berjalan bersama-sama. Nah kalau memang belum kita rembukkan yuk, kita bantu disini karena dia kewalahan dalam melansir bahan. Ini sangat menimbulkan, kembali lagi membangkitkan rasa gotong royong di masyarakat.”</i></p>	
4	Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan kepada tukang yang akan menggarap bangunan mengenai konstruksi bangunan sederhana sehingga memiliki pemahaman yang benar mengenai standar teknis 	

No	Tahapan	Hal yang perlu ditingkatkan	Sisi kritis yang menjadi perhatian
		<p>bangunan rumah seperti struktur pondasi, sloof, kolom, ring balok, struktur atap serta campuran beton yang benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat analisa dan daftar kebutuhan bahan sebagai kontrol dalam pembuatan RAB sehingga menyesuaikan dengan kemampuan swadaya. <p>Seperti dijelaskan oleh Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“Jadi ke depannya mungkin kita istilahnya memberikan semacam pemahaman dulu sebelum pelaksanaan fisiknya. Mungkin kita akan memberikan pemahaman kepada tukang secara teknis lah.”</i></p> <p>Serta Bapak Arry yaitu : <i>“.....tiang untuk tambahan perbaikan program ini ke depannya, kita buat list kebutuhan. Seperti kemarin yang tiang lakukan itu kita berikan, buat analisa, mungkin struktur bagian mana yang menjadi skala maksimal yang harus kita perbaiki.”</i></p>	
5	Survey Toko	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan survey harga bahan bangunan, agar melampirkan daftar harga distributor untuk bahan bangunan yang mengalami kenaikan sehingga mendapatkan harga yang wajar. <p>Sesuai dengan penjelasan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“Memang sekarang ini ada dinamisnya perubahan harga. Apabila dari pihak toko mampu menunjukkan seandainya ada kenaikan harga pihak toko bisa menunjukkan bahwa memang dari</i></p>	

No	Tahapan	Hal yang perlu ditingkatkan	Sisi kritis yang menjadi perhatian
		<i>suplier itu menaikan harga itu tentu terjadi perubahan harga ini."</i>	
6	Menyusun proposal	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan ke penerima bantuan sehingga proposal secara administrasi dan teknis dapat terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Arry selaku tenaga pendamping yaitu : <i>"kalau masalah RAB ini seperti di awal saya sampaikan kebanyakan masyarakat awam. Selain itu kita harus melakukan pendampingan secara intensif dan kolaboratif. Intensif dalam artian kita memang anggap mobilitas pendampingan masyarakat. Yang kedua kolaboratif kita juga harus berkoordinasi intens dengan tukang yang akan menjadi penggarap rumahnya. Biar nanti apa yang di harapkan itu sejalan."</i> 	
7	Pemanfaatan PKRS	<ul style="list-style-type: none"> • monitoring yang lebih intens dari Dinas Perkimta ke penerima bantuan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan dan memberikan solusi pemecahan masalah. Berdasarkan dari penjelasan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>"Untuk mensiasati itu selain kita memang melakukan monitoring langsung, jadi kita tidak hanya menanyakan progres ke pendamping maupun ke ketua kelompok akan tetapi kita langsung turun ke lapangan. Yang kita lakukan yaitu diawal-awal minggu, turun kita lakukan istilahnya monitoring langsung ke lapangan agar kita mengetahui progres-progres pelaksanaan mereka di</i> 	

No	Tahapan	Hal yang perlu ditingkatkan	Sisi kritis yang menjadi perhatian
		<i>lapangan. Apabila mereka mengalami kendala, kita antisipasi.</i>	
8	Pelaporan PKRS	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi terhadap pelaksanaan PKRS yang dilakukan sehingga ikut memiliki rasa tanggungjawab terhadap keberhasilan program. Berdasarkan dari penjelasan Kabid. Kawasan Permukiman yaitu : <i>“Jadi ketika masyarakat itu melakukan pengawasan kita sampaikan kalo dalam proses pembangunan itu dokumentasi diperlukan, waktu mereka apa istilahnya dokumentasi..... Dokumentasi dari awal pembangunan maupun sampai akhir,”</i> 	

Sumber: Analisa peneliti, 2022

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada sisi kritis *bottom up planning* pada program peningkatan kualitas rumah swadaya, didapat kesimpulan yaitu proses perencanaan pembangunan partisipatif pada program PKRS telah dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, verifikasi CPB, kesepakatan dan pembentukan KPB, Identifikasi kebutuhan penanganan rumah, survey toko, menyusun RAB, pemanfaatan PKRS serta pelaporan telah mewujudkan rumah layak huni bagi penerima bantuan PKRS. Namun selain hal di atas masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Permasalahan dalam tahapan program PKRS adalah kurangnya tingkat kehadiran dan penerima bantuan tidak dapat menerima informasi dengan baik saat kegiatan sosialisasi, memerlukan waktu lama untuk melakukan verifikasi dan terdapat CPB yang tidak memahami persyaratan administrasi CPB pada saat dilaksanakan verifikasi CPB, KPB belum berfungsi secara optimal dalam kegiatan PKRS, penerima bantuan tidak dapat menentukan kebutuhan penanganan rumah yaitu volume dan luas dari jenis kerusakan dan

kebutuhan dari bahan bangunan, harga bahan bangunan yang cenderung naik dan memerlukan waktu yang lama dalam survey, penerima bantuan belum memahami kebutuhan bahan dan satuan bahan bangunan yang digunakan dalam menyusun RAB, pelaksanaan perbaikan rumah tidak bisa segera dilakukan setelah bantuan tersalurkan serta keswadayaan yang rendah serta pembuatan laporan memerlukan waktu lama.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam tahapan program PKRS adalah penerima bantuan merasa sosialisasi hanyalah formalitas dan kurangnya minat untuk berdiskusi dalam kegiatan sosialisasi, lokasi rumah CPB yang berjauhan dan CPB belum memahami persyaratan secara utuh, terdapat anggota kelompok yang tidak memiliki alat komunikasi dan kurang minatnya penerima bantuan sebagai pengurus dalam KPBB, penerima bantuan tidak memahami teknis penilaian bangunan, harga bahan bangunan pabrikan tergantung pasokan distributor dan penerima bantuan mempunyai kebutuhan bahan bangunan yang berbeda, penerima bantuan selalu berganti setiap tahun sehingga perlu memberikan pemahaman dan pembelajaran lagi, penentuan hari baik untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah dan cuaca pada musim hujan serta penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pada tahap pelaporan PKRS yaitu kelengkapan administrasi yang tidak tersimpan dengan baik.

Dalam upaya perbaikan sehingga pelaksanaan program PKRS dapat berkelanjutan terdapat beberapa hal yaitu pada tahap sosialisasi dengan menambahkan sarana berupa buku panduan atau brosur tentang pelaksanaan PKRS dan melibatkan instansi terkait seperti Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, pada tahap verifikasi CPB yaitu melibatkan aparat desa/kelurahan dan langsung melakukan penilaian jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan setelah CPB dinyatakan layak, mengaktifkan peran kelompok melalui rembuk warga, memberikan pelatihan kepada tukang mengenai konstruksi bangunan serta membuat analisa dan daftar kebutuhan bahan sebagai kontrol dalam pembuatan RAB, melampirkan daftar harga distributor, melakukan pendampingan ke penerima bantuan sehingga proposal baik administrasi dan teknis serta monitoring yang lebih intens terhadap penerima bantuan dan mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi administrasi terhadap pelaksanaan PKRS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Aryati Puspasari. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25-34.
- Akbar Firyal. Muh, Srihandayani Suprpto, Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 135-142.
- Cahyono, Hendry, SE., M.E. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Teori dan Deskripsi*. Sidoarjo : Mejatamu
- Hamid, Hendrawati, Ir., M.Si, (2018). *Manajemen Pemberdayaan masyarakat*. Cetakan ke 1 Makassar: De la Macca.
- Laily, Elida Imro'atin Nur. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 299-303.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (2007), *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ndraha, Taladziluhu. (1990). *Persiapan Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2009). *Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak, B. (1982). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 05/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021.
- Rahman, Chairul (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Wedana*, 189-199.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan Ke-22, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulam, Muniyati. (2019). Penerapan Model Pembangunan Partisipatif Dalam Dinamika Pembangunan Di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 153-161.
- Sutarta, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tawai, Adrian Dr., S.Sos, Yusuf, Muh, Dr. S.Sos, M.Si. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Cetakan Pertama. Kendari: Literacy Institute